

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 20 1 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONASIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan deng r nendesaknya waktu pelaksanaan penyelengaraan SOUTY EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI

 Tahun 2011 dan ASIAN PARA GAMES VI Tahun 2011, maka pelaksanaan rengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas dan tepat waktu;
 - b. benwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu penetapkan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Intuk Penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES* VI Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945:
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG
/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES
(SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI
TAHUN 2011.

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan kesican ini meliputi pengadaan barang/jasa untuk keperluan penyel nggaran SCUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tal un 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI Tahun 2011 yang dibiayoi seluruh atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Presiden ini adalah untuk menyukseskan dan memperlancar penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES* VI Tahun 2011.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES* VI Tahun 2011 pada prinsipnya tetap berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tertar g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah cangan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebaga mana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan barang/jasa dapat di kukan dengan penunjukan langsung hanya untuk pengacaan barang/jasa yang mendesak dan tidak cukup waktu untuk dina ukan dengan cara pelelangan/seleksi umum atau sederhana.
- (3) Daftar paket peke jaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan penunj kan langsung sebagaimana diatur pada ayat (2), ditetapkan or h Menteri Negara Pemuda dan Olahraga berdasarkan usular dari Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN CAMES (Sea GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI Tahun 2011.
- (4) Daiam menetapkan daftar paket pekerjaaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Pemuda dan Olahraga dibantu oleh Tim yang terdiri dari unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan unsur terkait lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011 PRESIDEN REPUBLIK IN JON

ttd.

DR. H. SUSIL O BAN'S ANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Kakyat
Sekretaria. Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.